

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian gender

1. Pengertian Gender

Menurut Muhtar gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Sementara Fakih mendefinisikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Istilah gender dibedakan dari istilah seks Oakley 1997 ahli Sosiologi Inggris, merupakan orang yang mula-mula memberikan pembedaan dua istilah itu (Saptari dan Halzner, 1997: 88).

Istilah gender merujuk kepada perbedaan karakter laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya, yang berkaitan dengan sifat, status, posisi, dan perannya dalam masyarakat. Istilah Seks merujuk kepada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara biologis terutama yang berkaitan dengan prokreasi dan reproduksi.

Laki-laki dicirikan dengan adanya sperma dan penis serta perempuan dicirikan dengan adanya sel telur, rahim, vagina, dan payudara. Ciri jenis kelamin secara biologis tersebut bersifat bawaan, permanen, dan tidak dapat dipertukarkan (Abdullah, 2004 : 11).

Selanjutnya, yang dimaksud dengan gender adalah cara pandang atau persepsi manusia terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan didasarkan pada perbedaan jenis kelamin secara kodrati biologis. Gender dalam segala aspek kehidupan manusia mengkreasikan perbedaan antara perempuan dan laki-laki termasuk kreasi sosial kedudukan perempuan yang lebih rendah dari pada laki-laki. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa (Hadiati, 2010 : 15).

Gender adalah persoalan yang peka dan kompleks. Persoalan ini telah menjadi sesuatu yang klasik, bahkan suatu peradaban manusia itu sendiri. Perbedaan lakilaki dan wanita yang pada hakikatnya hanya merupakan perbedaan karakteristik biologis (jenis kelamin) dipertajam melalui proses sosialisasi proses sehingga menuntun pada beberapa Pratik diskriminasi terhadap wanita di berbagai bidang. Padahal seperti yang kita ketahui bersama, jumlah penduduk dunia sebagian besar wanita selama dekade terakhir ini, wanita telah menjadi segmen penting dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi.

Oleh karena itu penting untuk mengetahui apakah diskriminasi terhadap wanita dalam pasar tenaga kerja masih ada. Diskriminasi menyebabkan represesntasi wanita dalam ekonomi menurun mengakibatkan kerugian baik secara materi maupun spiritual. Kerugian itu antara

lain membuat tenaga kerja kurang kompetitif karena mereka menjadi kurang termotivasi dan secara emosional kurang sehat akibat penolakan yang dialaminya.

Karenanya pula, persoalan menghormati identitas gender adalah satu hal terpenting yang perlu di perjuangkan saat ini. Beberapa alasannya:

- a. Perbedaan jenis kelamin perlu agar spesies manusia lestari, bukan sekedar untuk berkembang biak tetapi dalam arti regenerasi kehidupan.
- b. Sifat perbedaan jenis kelamin berkaitan dengan budaya dan bahasa dalam budaya, dimana kemunduran kebudayaan seksual di sebabkan sekaligus diiringi oleh pelemahan nilai-nilai yang juga mengalami kemunduran.
- c. Yang dianggap atau seolah-olah universal itu sesungguhnya merupakan penguasa sebagai manusia oleh sebagian yang lain; yang utama membuktikan adalah dimasa kini manusia mengikuti sistem genealogis lelaki saja. padahal masyarakat terdiri dari separuh laki-laki dan separuh perempuan.¹

Pada teori strukturasi gender, hal itu ditafsirkan, produksi dan reproduksi sistem sosial dominatif represif ditentukan oleh optimalisasi penggunaan struktur gender aktor wanita dan aktor pria dalam interaksi sosial yang berlangsung.

¹ Jessica Andrea Rhemerev, *Representasi Perempuan Dalam Majalah Pria*, h. 20

Teori gender yang akan digunakan oleh penulis yaitu konsep gendernansoer fakih. Teori ini sesuai dengan tema penelitian penulis karena membahas mengenai manifestasi konstruksi gender yang menghasilkan ketidakadilan gender.konsep gender yaitu semua hal yang bias di pertukarkan antara sifat perempuan dan lakilaki, yang bias berubah dari waktu kewaktu serta berbeda dari tempat ke tempat lain maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas lainnya.² Ketidakadilan gender merupakan system dan struktur baik kaum laki-laki maupun perempuan menjadi korbandari system tersebut. Menurut Mansour fakih terdapat beberapa manifestasi ketidakadilan gender sebagai berikut:

- a. Gender dan marginalisasi perempuan, proses marginalisasi ini mengakibatkan pemiskinan yang dapat menimpa kaum laki-laki maupun perempuan. Sumber dari marginalisasi yaitu kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan ataupun asumsi ilmu pengetahuan.
- b. Gender dan subordinasi, anggapan bahwa perempuan irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bias tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting.
- c. Gender dan stereotype, pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu, salah satu jenis stereotype bersumber dari

² Mansour, Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Social*, (Yogyakarta : pustaka pelajar, 1996), h .9.

pandangan gender. Banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena stereotype.

- d. Gender dan kekerasan, kekerasan merupakan serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang, salah satu bentuk kekerasan salah satu jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan gender. Banyak macam kejahatan yang dikategorikan sebagai kekerasan gender. Diantaranya: bentuk pemerkosaan dalam perkawinan, tindakan pemukulan dan penyerangan yang terjadi dalam rumah.
- e. Beban kerja, perempuan dianggap memiliki sifat memelihara dan rajin sehingga berakibat pada semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan.³

2. Teori-teori Gender

Secara khusus tidak ditemukan suatu teori yang membicarakan masalah gender. Teori-teori yang digunakan untuk melihat permasalahan gender ini diadopsi dari teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli dalam bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan gender, terutama bidang sosial kemasyarakatan dan kejiwaan. Karena itu teori-teori yang digunakan untuk mendekati masalah gender ini banyak diambil dari teori-teori Sosiologi dan Psikologi.

³ Mansour, Fakhri, *Analisis Gender Dan Transformasi*, h. 13-21.

Cukup banyak teori yang dikembangkan oleh para ahli, terutama kaum feminis, untuk memperbincangkan masalah gender, tetapi dalam kesempatan ini akan dikemukakan beberapa saja yang dianggap penting dan cukup populer.

a. Teori Struktural-Fungsional

Teori atau pendekatan struktural-fungsional merupakan teori sosiologi yang diterapkan dalam melihat institusi keluarga. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang saling memengaruhi.

Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut dalam masyarakat. Banyak sosiolog yang mengembangkan teori ini dalam kehidupan keluarga pada abad ke-20, di antaranya adalah William F. Ogburn dan Talcott Parsons (Ratna Megawangi, 1999: 56). Teori struktural-fungsional mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial. Keragaman ini merupakan sumber utama dari adanya struktur masyarakat dan menentukan keragaman fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem. Sebagai contoh, dalam sebuah.

Organisasi sosial pasti ada anggota yang mampu menjadi pemimpin, ada yang menjadi sekretaris atau bendahara, dan ada yang menjadi anggota biasa. Perbedaan fungsi ini bertujuan untuk mencapai

tujuan organisasi, bukan untuk kepentingan individu. Struktur dan fungsi dalam sebuah organisasi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya, norma, dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat.

Dengan pembagian kerja yang seimbang, hubungan suami-isteri bisa berjalan dengan baik. Jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih antar fungsi, maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidakseimbangan.

Keseimbangan akan terwujud bila tradisi peran gender senantiasa mengacu kepada posisi semula. Teori struktural-fungsional ini mendapat kecaman dari kaum feminis, karena dianggap membenarkan praktik yang selalu mengaitkan peran sosial dengan jenis kelamin. Laki-laki diposisikan dalam urusan publik dan perempuan diposisikan dalam urusan domestik, terutama dalam masalah reproduksi. Menurut Sylvia Walby teori ini akan ditinggalkan secara total dalam masyarakat modern. Sedang Lindsey menilai teori ini akan melanggengkan dominasi laki-laki dalam stratifikasi gender di tengah-tengah masyarakat.

b. Teori sosio-konflik

Menurut Lockwood, suasana konflik akan selalu mewarnai masyarakat, terutama dalam hal distribusi sumber daya yang terbatas. Sifat pemementingan diri, menurutnya, akan menyebabkan diferensiasi kekuasaan yang ada menimbulkan sekelompok orang menindas kelompok lainnya. Perbedaan kepentingan dan pertentangan antar individu pada

akhirnya dapat menimbulkan konflik dalam suatu organisasi atau masyarakat. Dalam masalah gender, teori sosial-konflik terkadang diidentikkan dengan teori Marx, karena begitu kuatnya pengaruh Marx di dalamnya. Marx yang kemudian dilengkapi oleh F. Engels, mengemukakan suatu gagasan menarik bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian dari penindasan kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga. Hubungan laki-laki perempuan (suami-isteri) tidak ubahnya dengan hubungan proletar dan borjuis, hamba dan tuan, atau pemeras dan yang diperas. Dengan kata lain, ketimpangan peran gender dalam masyarakat bukan karena kodrat dari Tuhan, tetapi karena konstruksi masyarakat.

Teori ini selanjutnya dikembangkan oleh para pengikut Marx seperti F. Engels, R. Dahrendorf, dan Randall Collins. Asumsi yang dipakai dalam pengembangan teori sosial-konflik, atau teori determinisme ekonomi Marx, bertolak belakang dengan asumsi yang mendasari teori struktural-fungsional, yaitu:

1. Walaupun relasi sosial menggambarkan karakteristik yang sistemik, pola relasi yang ada sebenarnya penuh dengan kepentingan-kepentingan pribadi atau sekelompok orang. Hal ini membuktikan bahwa sistem sosial secara sistematis menghasilkan konflik.
2. Maka konflik adalah suatu yang takterhindarkan dalam semua sistem

social.

3. Konflik akan terjadi dalam aspek pendistribusian sumber daya yang terbatas, terutama kekuasaan.
4. konflik adalah sumber utama terjadinya perubahan dalam masyarakat menurut engels, perkembangan akumulasi harta benda pribadi dan kontrol laki-laki terhadap produksi merupakan sebab paling mendasar terjadinya subordinasi perempuan.

Seolah-olah Engels mengatakan bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan adalah hasil keunggulan kaum kapitalis atas kaum pekerja. Penurunan status perempuan mempunyai korelasi dengan perkembangan produksi perdagangan.

Keluarga, menurut teori ini, bukan sebuah kesatuan yang normatif (harmonis dan seimbang), melainkan lebih dilihat sebagai sebuah sistem yang penuh konflik yang menganggap bahwa keragaman biologis dapat dipakai untuk melegitimasi relasi sosial yang operatif. Keragaman biologis yang menciptakan peran gender dianggap konstruksi budaya, sosialisasi

kapitalisme, atau patriarkat. Menurut para feminis Marxis dan sosialis institusi yang paling eksis dalam melanggengkan peran gender adalah keluarga dan agama, sehingga usaha untuk menciptakan *perfect equality* (kesetaraan gender 50/50) adalah dengan menghilangkan peran biologis gender, yaitu dengan usaha radikal untuk mengubah pola pikir dan struktur keluarga yang menciptakannya.

c. Teori Feminisme Liberal

Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena itu perempuan harus mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Meskipun demikian, kelompok feminis liberal menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa hal masih tetap ada perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun juga, fungsi organ reproduksi bagi perempuan membawa konsekuensi logis dalam kehidupan bermasyarakat (Ratna Megawangi, 1999: 228).

Teori kelompok ini termasuk paling moderat di antara teori-teori feminisme. Pengikut teori ini menghendaki agar perempuan diintegrasikan secara total dalam semua peran, termasuk bekerja di luar rumah. Dengan demikian, tidak ada lagi suatu kelompok jenis kelamin yang lebih dominan. Organ reproduksi bukan merupakan penghalang bagi perempuan untuk memasuki peran-peran di sektor publik.

d. Teori Feminisme Marxis-Sosialis

Feminisme ini bertujuan mengadakan restrukturisasi masyarakat agar tercapai kesetaraan gender. Ketimpangan gender disebabkan oleh sistem kapitalisme yang menimbulkan kelas-kelas dan *division of labour*, termasuk di dalam keluarga. Gerakan kelompok ini mengadopsi teori praxis Marxisme, yaitu teori penyadaran pada kelompok tertindas, agar kaum perempuan sadar bahwa mereka

merupakan 'kelas' yang tidak diuntungkan. Proses penyadaran ini adalah usaha untuk membangkitkan rasa emosi para perempuan agar bangkit untuk merubah keadaan (Ratna Megawangi, 1999: 225).

Teori ini juga tidak luput dari kritikan, karena terlalu melupakan pekerjaan domestik. Marx dan Engels sama sekali tidak melihat nilai ekonomi pekerjaan domestik. Pekerjaan domestik dianggap pekerjaan tidak produktif. Padahal semua pekerjaan publik yang mempunyai nilai ekonomi sangat bergantung pada produk-produk dari pekerjaan rumah tangga, misalnya makanan yang siap dimakan, rumah yang layak ditempati, dan lain-lain. Kontribusi ekonomi yang dihasilkan kaum perempuan melalui pekerjaan domestiknya telah banyak diperhitungkan oleh kaum feminis sendiri. Kalau dinilai dengan uang, perempuan sebenarnya dapat memiliki penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki dari sektor domestik yang dikerjakannya (Ratna Megawangi, 1999: 143).

e. Teori Feminisme Radikal

Teori ini berkembang pesat di Amerika Serikat pada kurun waktu 1960-an dan 1970-an. Meskipun teori ini hampir sama dengan teori feminisme Marxissosialis, teori ini lebih memfokuskan serangannya pada keberadaan institusi keluarga dan sistem patriarki. Keluarga dianggapnya sebagai institusi yang melegitimasi dominasi laki-laki (patriarki), sehingga perempuan tertindas. Feminisme ini cenderung membenci laki-laki sebagai individu dan mengajak perempuan untuk

mandiri, bahkan tanpa perlu keberadaan laki-laki dalam kehidupan perempuan. Elsa Gidlow mengemukakan teori bahwa menjadi lesbian adalah telah terbebas dari dominasi laki-laki, baik internal maupun eksternal. Martha Shelley selanjutnya memperkuat bahwa perempuan lesbian perlu dijadikan model sebagai perempuan mandiri (Ratna Megawangi, 1999: 226).

Karena keradikalannya, teori ini mendapat kritikan yang tajam, bukan saja dari kalangan sosiolog, tetapi juga dari kalangan feminis sendiri. Tokoh feminis liberal tidak setuju sepenuhnya dengan teori ini. Persamaan total antara laki-laki dan perempuan pada akhirnya akan merugikan perempuan sendiri. Laki-laki yang tidak terbebani oleh masalah reproduksi akan sulit diimbangi oleh perempuan yang tidak bisa lepas dari beban ini.

f. Teori Ekofeminisme

Teori ekofeminisme muncul karena ketidakpuasan akan arah perkembangan ekologi dunia yang semakin bobrok. Teori ini mempunyai konsep yang bertolak belakang dengan tiga teori feminisme modern seperti di atas. Teori-teori feminisme modern berasumsi bahwa individu adalah makhluk otonom yang lepas dari pengaruh lingkungannya dan berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Sedang teori ekofeminisme melihat individu secara lebih komprehensif, yaitu sebagai makhluk yang terikat dan berinteraksi dengan lingkungannya (Ratna Megawangi, 1999: 189). Menurut teori ini, apa yang terjadi setelah para perempuan masuk ke dunia maskulin

yang tadinya didominasi oleh laki-laki adalah tidak lagi menonjolkan kualitas femininnya, tetapi justru menjadi male clone (tiruan laki-laki) dan masuk dalam perangkat sistem maskulin yang hierarkhis. Masuknya perempuan ke dunia maskulin (dunia publik umumnya) telah menyebabkan peradaban modern semakin dominan diwarnai oleh kualitas maskulin. Contoh nyata dari cerminan mudarnya kualitas feminin (cinta, pengasuhan, dan pemeliharaan) dalam masyarakat adalah semakin rusaknya alam, meningkatnya kriminalitas, menurunnya solidaritas sosial, dan semakin banyaknya perempuan yang menelantarkan anak-anaknya (Ratna Megawangi, 1999: 183).

1. Gender Dalam Persepektif Islam

Ketika anak perempuan mulai beranjak remaja dan dewasa, Islam dengan tegas melarang memperlakukan perempuan seperti benda yang dikendalikan oleh orang tuanya atau keluarganya yang laki-laki. Ia harus dimintai pendapat ketika hendak dinikahkan. Ketentuan ini berlaku untuk semua perempuan baik gadis maupun janda.

Menurut Nasaruddin Umar, ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam Al-Qur'an. Variabel-variabel antara lain :

- a. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba

Salah satu tujuan pencipta manusia adalah untuk menyembah kepada tuhan, sebagaimana di sebutkan dalam Qs.al-zariyat(52) : 56;

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون (الزري يا ٥١: ٥٦)

Terjemahnya :“*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah Ku*”.

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang sama untuk menjadi hamba yang ideal.

Hamba ideal dalam Al-Qur’an biasa diistilahkan dengan orang-orang yang bertaqwa (*muttaqun*) dan untuk mencapai derajat *muttaqun* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu. Al-Qur’an menegaskan bahwa hamba yang paling ideal adalah para *muttaqun* sebagaimana disebutkan di dalam QS. Al-Hujurat (49) : 13 ;

Kekhususan-kekhususan yang diperuntukkan kepada laki-laki, seperti seorang suami setingkat lebih tinggi di atas isteri (QS. Al- Baqarah (2) : 228), laki-laki pelindung bagi perempuan (QS. Al-Nisa (4) : 11), menjadi saksi yang efektif (QS. Al-Baqarah (2) : 282), dan diperkenankan poligami bagi mereka yang memenuhi syarat (QS. Al-Nisa (4) : 3), tetapi ini semua tidak menyebabkan laki-laki menjadi hamba-hamba utama. Kelebihan-kelebihan tersebut diberikan kepada laki-laki dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran publik dan sosial lebih ketika ayat-ayat diturunkan.

Namun, apabila kita lihat perkembangan sekarang ini peran publik perempuan dalam masyarakat diberikan peluang yang sama terhadap laki-laki. Jadi, adanya kelebihan-kelebihan tersebut itu disebabkan karena

adanya pembatasan-pembatasan budaya di dalam masyarakat. Dan sifatnya bukan permanen dan alami.

b. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi

Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah, di samping untuk menjadi hamba (*abid*) yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah swt. Juga untuk menjadi khalifah di bumi (*khalifah fi al-ardl*). Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan di dalam Qs. Al-An'am (5) : 551,

و هو الذي جعلكم خلائف الا ارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليلوكم في ما ا
ثكم ان ربك سريع العقاب وانه لخبير رحيم

Terjemahnya: "*Dan Dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi dan meninggikan sebahagian kalian atas tentang apa yang diberikan-Nya kepada kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian amat cepat sisan-Nya, dan sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*"

Kata khalifah dalam kedua ayat di atas tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai *khalifah*, yang mempertanggungjawabkan tugas kekhalifahannya di bumi sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawabkan sebagai hamba tuhan.

c. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primoridal

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengembangi amanah dan menerima perjanjian *primordial* dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam Qs.Al-A'raf (7) : 572.

واذاخذريك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم
قالوا بلا شهدنا.

Terjemahnya: *Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunanmu anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "bukankah Aku ini Tuhanmu "Mereka menjawab "Betul" (Engkau Tuhan kami).*

Berdasarkan pada ayat tersebut, bahwa setiap manusia, baik laki atau pun perempuan sebelum dilahirkan di dunia ini menerima perjanjian dari Tuhannya. Perjanjian atau ikrar tersebut mengandung tentang pengakuan manusia terhadap keberadaan Tuhan. Dalam Islam, tanggung jawab individual kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu semenjak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin.laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.

- d. Adam dan hawa, terlibat secara aktif dalam drama kosmis melakukan drama yang di larang.

Semua ayat yang menceritakan tentang drama *kosmis*, yakni cerita tentang keadaan Adam dan pasangannya di surga sampai keluar di bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (*huma*) yakni untuk kata ganti Adam dan Hawa, Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga disebutkan dalam Qs. Al-Baqarah (2) 35 :

و قلنا ياد م اسكن انت وزوجك الجنة وكلامنهارغدا حيث شئتما ولا تقرباهذه الشجرة فتكونا من الظلمين.

Terjemahnya : *“Dan Kami berfirman: “Hai Adam diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zhalim”.*

e. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi

Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ditegaskan secara khusus dalam al-Qur’an sebagai berikut QS. Al-Imran (3) : 195;

فاستجاب لهم ربهم انى لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر اوانثى.

Terjemahnya: *“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal- orang-orang yang beramal di antara kalian, baik laki-laki atau perempuan.*

Ayat-ayat tersebut di atas mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik

dalam bidang spritual maupun urusan karier provesional, tidak mesti dimonopoli oleh satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal. Namun, Dalam kenyataan masyarakat, konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan.

B. STRUKTURASI

1. Pengertian Strukturasi

Strukturasi adalah suatu proses bagaimana aktor mereproduksi struktur, melalui sistem interaksi yang muncul sebagai hasil dari penggunaan struktur. Agensi dan struktur adalah saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan, karena keduanya adalah 'dualitas struktur'. Aktor (manusia) memiliki kemampuan sebagai pencipta struktur masyarakat, melalui pembuatan norma, penyusunan nilai-nilai, dan perancangan penerimaan sosial. Tetapi aktor (manusia) mendapatkan pembatasan dari struktur sosial. Seseorang tidak dapat memilih siapa orang tuanya dan waktu kelahirannya. Giddens menggambarkan struktur sebagai modalitas, berupa seperangkat tata aturan dan berbagai sumber daya yang mengendalikan bahkan mengarahkan tindakan manusia. Tindakan manusia dibatasi oleh aturan, tetapi sumber daya menyediakan fasilitas bagi tindakan manusia (Giddens, 1984; Whittington, 2015).⁴

⁴ Zainal abidin achmad, *Anatomi Teori Strukturasi Dan Ideologi Jalan Ketiga Anthony Giddens*, jurnal translittere, vol 9, no. 2/2020. h.57

Maka dalam teori strukturasi yang menjadi pusat perhatian bukan struktur, bukan pula agensi, melainkan apa yang oleh Giddens disebut “social practices” Memang orang tidak boleh melupakan struktur dan agensi, bahkan seharusnya memahami secara detil struktur dan agensi. Namun fokus utama harus diletakkan pada social practice, yaitu bagaimana manusia-manusia menjalani hidup sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan anak-istri/suami, sahabat, maupun dengan birokrat, pelayan bank.

2. Teori Strukturasi Gender

Teori ini merupakan modifikasi teori strukturasi Anthony Giddens (1986; 1986) sebagai varian dari teori ekonomi-politik komunikasi massa dalam paradigma kritis struktural dikaitkan dengan analisis feminis (Golding dan Murdock, 1995).

Teori strukturasi menegaskan, produksi dan reproduksi sistem sosial bergantung pada optimalisasi penggunaan struktur aktor dalam interaksi. Proses produksi ataupun reproduksi sistem sosial ini bisa dilakukan dengan cara kursif (kekerasan aktual) atau persuasif (kekerasan simbolik). Pada teori strukturasi gender, hal itu ditafsirkan, produksi dan reproduksi sistem sosial dominatifrepresif ditentukan oleh optimalisasi penggunaan struktur gender aktor wanita dan aktor pria dalam interaksi sosial yang berlangsung.

Menurut teori strukturasi, struktur dominasi dipertahankan oleh kelompok dominan melalui struktur signifikasi dan struktur legitimasi yang mampu menyembunyikan wajah dominasi untuk dikenali oleh korbannya (misrecognition). Mekanisme ideologis semacam itu bekerja melalui proses naturalisasi praktek sosial yang berlangsung.

Melalui proses naturalisasi ini, praktek sosial dominatif-represif dengan menggunakan kekerasan bisa dipandang sebagai bagian dari praktek sosial normal dan wajar. Upaya penyingkapan selubung naturalisasi akan mempunyai potensi besar bagi terjadinya produksi sistem sosial egaliter. Hal itu bisa terjadi apabila terdapat kepentingan emansipatoristik dalam proses strukturasi.

Melalui pendekatan feminis dengan bantuan Bourdieu (1990; 1993), Connell (1987), dan Habermas (1996; 2005), teori strukturasi mentransformasikan dirinya dalam teori strukturasi gender. Dalam teori strukturasi gender, struktur dominasi gender terjadi melalui penundukan agen wanita oleh agen pria dan agen pemilik modal (biasanya juga agen pria) dengan menggunakan struktur signifikasi dan struktur legitimasi.

Struktur dominasi gender terjadi dalam interaksi kekuasaan dengan menggunakan komunikasi, sanksi, dan kekerasan berdasarkan modalitas fasilitas (alokatif dan otoritatif), skema interpretasi, norma, dan seksualitas. Dalam teori strukturasi gender, proses ideologis untuk menyembunyikan wajah dominasi gender agen pria terjadi melalui proses naturalisasi kekerasan terhadap agen wanita sebagai bagian dari praktek sosial yang wajar dan normal.

Proses naturalisasi untuk "menormalkan" struktur dominatif-represif itu dilakukan melalui politisasi relasi gender dan purifikasi kognisi gender. Politisasi relasi gender mewujud dalam bentuk pembagian kerja (division of labour) secara seksual dan justifikasi terhadap relasi heteroseksual. Purifikasi kognisi gender dilakukan dengan peneguhan stereotipe peran gender melalui

media massa, eksklusi dan marjinalisasi wanita dari narasi publik, serta dikotomisasi domain publik-privat melalui romantisme bagi agen wanita untuk menemukan cinta sejati dan heroisme bagi agen pria untuk menggunakan kekerasan.

Penggunaan kekerasan oleh agen pria untuk mendapatkan kepatuhan agen wanita tersebut mendapat justifikasi dari ideologi gender dominan: patriarkisme, kapitalisme, dan misoginisme. Dalam proses penormalan itu, ideologi patriarkisme membenarkan penggunaan kekerasan fisik dan seksual oleh agen pria atas agen wanita di rumah maupun di tempat kerja.

Ideologi kapitalisme membenarkan penggunaan kekerasan alienatif dalam wujud pembagian kerja secara seksual dengan implikasi pada kekerasan psikologis dalam bentuk diskriminasi dan prasangka negatif terhadap peran sosial wanita di masyarakat sebagai kelompok inferior. Ideologi misoginisme membenarkan terjadinya proses dehumanisasi wanita melalui perendahan derajat (objek kekerasan simbolik, fisik, seksual, kriminal) dan pengangkatan derajat (idealisasi peran sosial wanita sebagai istri dan ibu rumah tangga yang sempurna).

C. Ekonomi politik

1. Pengertian Ekonomi Politik

Ekonomi politik adalah pendekatan kritik sosial yang berfokus pada hubungan antara struktur ekonomi dan dinamika industri media dan konten ideologis media. (McQuail,2011:105). Melihat hal ini maka institusi media merupakan sebagai bagian dari sistem ekonomi dengan hubungan erat

kepada sistem politik. Hal ini mengakibatkan berkurangnya sumber media yang independen, konsentrasi pada khalayak yang lebih luas, menghindari risiko, dan mengurangi penanaman modal pada tugas media yang kurang menguntungkan. Pada sisi lainnya, media juga akan mengabaikan kepentingan khalayak potensial yang kecil dan miskin, karena dinilai tidak menguntungkan. Kemudian pemberitaan terhadap kelompok masyarakat minoritas, cenderung tidak seimbang. Barant (2011:250) menyebutnya teori ekonomi politik media fokus pada penggunaan elite sosial atas kekuatan ekonomi untuk mengeksploitasi institusi media.

2. Teori Ekonomi Politik Media

Ekonomi politik media terkait dengan masalah kapital atau modal dari para investor yang bergerak dalam industri media. Para pemilik modal menjadikan media sebagai usaha untuk meraih untung, dimana keuntungan tersebut diinvestasikan kembali untuk pengembangan medianya. Sehingga pengakumulasian keuntungan itu, menyebabkan kepemilikan media semakin besar. Dalam menjalankan media, investor mempekerjakan karyawan untuk menghasilkan produk media. Untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana media memproduksi isi, mendistribusikan sehingga bernilai ekonomis, Vincent

Mosco menawarkan tiga konsep untuk mendekatinya yakni: komodifikasi (commodification), spasialisasi (spatialization) dan strukturasi (structuration) (Mosco, 1996:139). Komodifikasi berhubungan dengan bagaimana proses transformasi barang dan jasa beserta nilai gunanya menjadi suatu komoditas yang mempunyai nilai tukar di pasar.

Spasialisasi, berkaitan dengan sejauh mana media mampu menyajikan produknya di depan pembaca dalam batasan ruang dan waktu. Pada aras ini maka struktur kelembagaan media menentukan perannya di dalam memenuhi jaringan dan kecepatan penyampaian produk media di hadapan khalayak. Strukturasi berkaitan dengan relasi ide antar agen masyarakat, proses sosial dan praktik sosial dalam analisis struktur. Strukturasi dapat digambarkan sebagai proses dimana struktur sosial saling ditegakkan oleh para agen sosial, dan bahkan masing-masing bagian dari struktur mampu bertindak melayani bagian yang lain. Hasil akhir dari strukturasi adalah serangkaian hubungan sosial dan proses kekuasaan diorganisasikan di antara kelas, gender, ras dan gerakan sosial yang masing-masing berhubungan satu sama lain.

Teori ekonomi politik memiliki kekuatan pada tiga hal yaitu berfokus pada bagaimana media dibangun dan dikendalikan, menawarkan penyelidikan empiris mengenai keuangan media, dan mencari hubungan antara proses produksi konten media dan keuangan media. (Barant, 2010:263)

Teori ekonomi politik bersifat kritis, dimana teori ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang segala sesuai dan menyediakan cara-cara pengganti untuk menafsirkan peran sosial media. (Barant,2010:252)

Teori ekonomi politik media fokus pada media massa dan budaya massa, dimana keduanya dikaitkan dengan berbagai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Teori ini mengidentifikasi berbagai kendala atau hambatan yang dilakukan para praktisi media yang membatasi

kemampuan mereka untuk menantang kekuasaan yang sedang mapan. Dimana penguasa membatasi produksi konten yang dilakukan pekerja media, sehingga konten media yang diproduksi tersebut kian memperkuat status quo. Sehingga menghambat berbagai upaya untuk menghasilkan perubahan sosial yang konstruktif. Upaya penghambatan para pemilik pemodal, bertolak belakang dengan teoritikus ekonomi politik ini, yang justru aktif bekerja demi perubahan sosial.

Karena itu, menurut Barant 2010:263), para teoritikus ekonomi politik menitikberatkan pada bagaimana proses produksi konten dan distribusi dikendalikan. Kekuatan utama teori ini terletak pada kemampuannya dalam menyodorkan gagasan yang dapat dibuktikan secara empiris, yakni gagasan yang menyangkut kondisi pasar. Salah satu kelemahan aliran ekonomi politik ialah unsur-unsur yang berada dalam kontrol publik tidak begitu mudah dijelaskan dalam pengertian mekanisme kerja pasar bebas. Walaupun aliran memusatkan perhatian pada media sebagai proses ekonomi yang menghasilkan komoditi (isi), namun aliran ini kemudian melahirkan ragam aliran baru yang menarik, yakni ragam aliran yang menyebutkan bahwa media sebenarnya menciptakan khalayak dalam pengertian media mengarahkan perhatian khalayak ke pemasang iklan dan membentuk perilaku publik media sampai pada batas-batas tertentu.

3. Teori Ekonomi Politik

Mosco mendefinisikan ekonomi politik adalah komunikasi sebagai studi hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan yang memengaruhi

produksi, distribusi, dan konsumsi berbagai sumber daya termasuk sumber daya komunikasi.

Ketika diterapkan pada media komunikasi, ekonomi politik cenderung memfokuskan perhatiannya pada bagaimana kerja institusi media berkaitan dengan institusi lainnya seperti insitusi politik, keuangan, dan industri serta bagaimana hal-hal tersebut memengaruhi industri media dan praktek-praktek profesional.

Penelitian dunia ketiga, merangkum berbagai pendekatan dengan penekanan utama sebagai respons terhadap modernisasi dan paradigma developmentalist yang berasal dari Barat terutama USA. Kelompok ini menggabungkan komunikasi ke dalam bentuk paradigma penjelasan yang bersifat simpatik untuk memancing perhatian politik dan intelektual. Pertumbuhan media dilihat sebagai bagian dari indeks pembangunan. Pendekatan yang digunakan beragam yakni teori ketergantungan, sistem dunia, dan ekonomi politik Neo Marxian. Pendekatan Ekonom politik di Dunia Ketiga mempertanyakan premis dasar model ini, terutama determinisme teknologi dan penghilangan kepentingan praktis dalam hubungan kekuasaan yang membentuk istilah-istilah pertukaran ekonomi dan sosial antara bangsa-bangsa Dunia Pertama dan Ketiga dan hubungan kelas antar lapisan.

Menurut The New Palgrave (Mosco, 1996) politik-ekonomi adalah ilmu mengenai kesejahteraan dan berkaitan dengan usaha-usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi dan memuaskan keinginannya. Sedangkan Mosco sendiri memberi pengertian politik-ekonomi sebagai

studi mengenai relasi-relasi sosial terutama relasi kekuasaan, yang secara bersama-sama mendasari produksi, distribusi dan konsumsi sumberdaya.⁵

Konsep ini dikembangkan oleh para ahli dan peneliti media dan ekonomi politik, diantaranya adalah Dallas Walker Smythe, Herbert Schiller, Vincent Mosco, Dan Schiller, dan Robert McChesney. Oleh McChesney (2008), ekonomi politik komunikasi disebut juga dengan ekonomi politik media yang menitikberatkan pada kepemilikan media, pentingnya periklanan bagi perusahaan media, regulasi media, dan hubungan ketiga hal tersebut dengan kekuasaan serta bagaimana media massa beroperasi.

Terkait dengan penerapan ekonomi politik pada media, McQuail menyuguhkan definisi teori ekonomi politik sebagai pendekatan kritis sosial yang menitikberatkan utamanya pada hubungan antara struktur ekonomi dan dinamika industri media dan konten ideologis media. Sebagai salah satu teori media massa, teori ekonomi politik media ini mengarahkan perhatian penelitian pada analisis empiris struktur kepemilikan dan pengawasan media serta cara kekuatan pasar media beroperasi. Dari sudut pandang ini, lembaga media harus dianggap sebagai bagian dari sistem ekonomi yang berkaitan erat dengan sistem politik.

Adapun konsekuensi yang harus diperhatikan terletak pada pengurangan sumber media independen, konsentrasi pada pasar terbesar,

⁵ S. Sarwoprasodjo-Agung, "Perbandingan Pendekatan Ekonomi-Politik Media dan Studi Kebudayaan dalam Kajian Komunikasi Massa", *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, Vol. 06, No. 1, (Februari 2008), h. 96

menghindari resiko, dan mengurangi investasi dalam tugas media yang kurang menguntungkan. McQuail juga menyatakan ditemukannya pengabaian terhadap sektor yang lebih kecil dan lebih miskin dari khalayak potensial dan kerap kali media berita yang tidak seimbang secara politis.

Sementara itu menurut Jin (2018), ekonomi politik media melingkupi beberapa ranah kajian yaitu jurnalisme, penyiaran, periklanan, serta teknologi informasi komunikasi dan informasi. Lebih lanjut ia menyatakan, pendekatan ekonomi politik media menganalisa hubungan antara kekuasaan dengan politik, mediasi, dan ekonomi. Untuk menganalisa hubungan ini, ada beberapa hal perlu dilakukan, antara lain sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi sejarah intelektual ekonomi politik yang menitikberatkan pada pembentukan dan pertumbuhan ekonomi politik media sebagai sebuah bidang kajian akademis.
- b. Diskusi mengenai epistemologi bidang kajian ekonomi politik dengan menekankan pada beberapa karakteristik utama yang membedakannya dengan pendekatan media dan penelitian komunikasi lainnya.
- c. Pemahaman terhadap regulasi-regulasi yang memberi dampak terhadap teknologi komunikasi dan informasi dan/atau lingkungan komunikasi media digital, khususnya memetakan dimulainya kajian ekonomi politik media dalam industri budaya. Lebih khusus lagi perlu untuk memahami bagaimana cara para ahli ekonomi politik mengembangkan dan menggunakan ekonomi politik dalam media digital dan lingkungan media baru yang digerakkan oleh berbagai

perangkat teknologi dalam tiga area yakni perangkat digital, *big data*, dan tenaga digital. Area-area ini sangat penting untuk menganalisa hubungan antara kekuasaan dengan politik, mediasi, dan ekonomi. Hal ini dikarenakan mereka tidak hanya terhubung secara rumit melainkan juga karena mereka telah menjadi bagian utama dari kapitalisme modern yang masif.

Dari ulasan di atas, permasalahan yang dikupas dengan pisau ekonomi politik media baik di masa lalu, masa kini, maupun masa mendatang di antaranya adalah sifat jurnalistik dan hubungannya dengan praktek-praktek demokrasi; memahami propaganda yang dilakukan oleh pemerintah, kepentingan komersial, dan pihak swasta; media komersial dan depolitisasi masyarakat; hubungan media dengan ketidaksetaraan ras, gender, dan ekonomi.

Juga proses pengambilan keputusan komunikasi, regulasi dan kebijakan telekomunikasi; peran khusus periklanan dalam membentuk pasar media dan isi media; hubungan media dengan gerakan sosial; penyiaran publik dan pembentukan sistem dan institusi media alternatif; sifat komersialisme dan dampaknya terhadap budaya; hubungan komunikasi dengan kapitalisme global dan kontemporer; dan hubungan teknologi dengan media, politik, dan masyarakat.⁶

Teori ekonomi politik media fokus pada media massa dan budaya massa, dimana keduanya dikaitkan dengan berbagai permasalahan sosial

⁶ Pakar Komunikasi, *Teori Ekonomi Politik Media*
<https://pakarkomunikasi.com/teoriekonomipolitik-media> di Akses Pada Tanggal 14 Juni 2021

yang terjadi di masyarakat. Teori ini mengidentifikasi berbagai kendala atau hambatan yang dilakukan para praktisi media yang membatasi kemampuan mereka untuk menantang kekuasaan yang sedang mapan. Dimana penguasa membatasi produksi konten yang dilakukan pekerja media, sehingga konten media yang diproduksi tersebut kian memperkuat status quo. Sehingga menghambat berbagai upaya untuk menghasilkan perubahan sosial yang konstruktif. Upaya penghambatan para pemilik pemodal, bertolak belakang dengan teoritikus ekonomi politik ini, yang justru aktif bekerja demi perubahan social.

Para teoritikus ekonomi politik menitikberatkan pada bagaimana proses produksi konten dan distribusi dikendalikan. Kekuatan utama teori ini terletak pada kemampuannya dalam menyodorkan gagasan yang dapat dibuktikan secara empiris, yakni gagasan yang menyangkut kondisi pasar. Salah satu kelemahan aliran ekonomi politik ialah unsur-unsur yang berada dalam kontrol publik tidak begitu mudah dijelaskan dalam pengertian mekanisme kerja pasar bebas. Walaupun aliran memusatkan perhatian pada media sebagai proses ekonomi yang menghasilkan komoditi (isi), namun aliran ini kemudian melahirkan ragam aliran baru yang menarik, yakni ragam aliran yang menyebutkan bahwa media sebenarnya menciptakan khalayak dalam pengertian media mengarahkan perhatian khalayak ke pemasang iklan dan membentuk perilaku publik media sampai pada batas-batas tertentu.

Ekonomi politik adalah pendekatan kritik sosial yang berfokus pada hubungan antara struktur ekonomi dan dinamika industri media dan konten

ideologis media. (McQuail,2011:105). Melihat hal ini maka institusi media merupakan sebagai bagian dari sistem ekonomi dengan hubungan erat kepada sistem politik. Hal ini mengakibatkan berkurangnya sumber media yang independen, konsentrasi pada khalayak yang lebih luas, menghindari risiko, dan mengurangi penanaman modal pada tugas media yang kurang menguntungkan. Pada sisi lainnya, media juga akan mengabaikan kepentingan khalayak potensial yang kecil dan miskin, karena dinilai tidak menguntungkan. Kemudian pemberitaan terhadap kelompok masyarakat minoritas, cenderung tidak seimbang. Barant (2011:250) menyebutnya teori ekonomi politik media fokus pada penggunaan elite sosial atas kekuatan ekonomi untuk mengeksploitasi institusi media.

Dalam pendekatan ekonomi politik, kepemilikan media (media ownership) mempunyai arti penting untuk melihat peran, ideologi, konten media, dan efek yang ditimbulkan media kepada masyarakat. Kepemilikan media yang bersifat kapitalistik akan dapat dijumpai jika berada pada satu negara yang menganut sistem demokrasi, dimana campur tangan pemerintah sangat sedikit dalam mengatur media dan pasar memegang kendali dalam semangat kapitalisme. Para peneliti, baik liberal maupun Marxis, samasama sepakat bahwa analisis kepemilikan media berhubungan erat pada kapitalisme. Kepemilikan media juga menjadi sebuah term yang selalu dihubungkan dengan konglomerasi dan monopoli media.

Perspektif ekonomi politik adalah proses produksi berita tidak ubahnya seperti relasi ekonomi yang ditempatkan sebagai alat-alat atau komponen yang menghasilkan keuntungan dan peningkatan modal bagi media massa.

Asumsi sederhananya adalah bahwa isi media lebih diatur oleh kekuatan-kekuatan ekonomi media.⁷

4. Pasar Bisnis Media

Memasuki era moderen, media massa telah memasuki era industri atau telah menjadi institusi ekonomi. Ciri dari era industrialisasi adalah adanya kebutuhan modal yang cukup besar untuk mendirikan dan mengelola bisnis media massa. Menurut McQuail (2011:245) media semakin menjadi industri tanpa meninggalkan bentuknya sebagai institusi masyarakat; dan pemahaman tentang prinsip-prinsip utama struktur dan dinamika media menuntut analisis ekonomi, selain politik dan budaya. Meski media tumbuh sebagai respons terhadap kebutuhan sosial dan budaya individu dan masyarakat, media pada umumnya dikelola sebagai perusahaan bisnis. Karena itu, maka pengelolaan media massa membutuhkan modal. Menurut Vivian (2008:20), mendirikan dan mengoperasikan media massa butuh biaya mahal. Peralatan dan fasilitas membutuhkan investasi besar. Media massa beroperasi dalam lingkungan kapitalistis. Dengan sedikit pengecualian, mereka berusaha mendapatkan banyak uang.

Kondisi ini membuat bisnis media hanya bisa dilakukan para pemodal kuat. Pemodal akan menanamkan uangnya, tidak hanya untuk mengembangkan perusahaan, tapi juga untuk menghadapi persaingan bisnis media yang cukup ketat. Maka untuk mengembalikan modal yang sudah

⁷ Jamhur Poti, "Ekonomi Politik, Media Dan Ruang Public" , *Jurnal Semiotika*, Vol. 13, No. 2, (2019), h. 203-205

ditanamkan, pemilik media akan mengharuskan media tersebut meraih laba. Bisnis media selalu mengalami perubahan. Menurut William L. Rivers (2004:51) perubahan media akibat perkembangan demokrasi, revolusi industri dan teknologi, serta bermunculan kota-kota baru.

Pertama, sistem demokrasi yang dianut oleh setiap negara, amat menentukan bagaimana perkembangan media massa. Negara-negara yang mengadopsi sistem demokrasi memberikan kebebasan pers sebagai bentuk untuk tumbuhnya industri media. Kedua, revolusi industri dan teknologi telah mengubah cara kerja media dalam bisnis, pemberitaan, distribusi, dan iklan. Revolusi teknologi mengubah media dari kegiatan sampingan menjadi industri yang membutuhkan investasi cukup besar. Revolusi industri ditandai dengan digunakannya berbagai teknologi mekanik. Ketersediaan listrik yang memacu energi pabrik dan transportasi, melandasi muncul dan berkembangnya radio, film, dan televisi. Kemajuan teknologi telah meningkatkan ukuran, jangkauan, dan efisiensi dalam semua lini usahanya untuk menghadapi persaingan industri media. Efisiensi dapat dilakukan pada level manajemen, organisasi, produksi, dan distribusi. Sehingga dapat memperkecil biaya operasional perusahaan, meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan, dan meningkatkan pendapatan. Kemajuan teknologi memunculkan produk media baru yang memiliki nilai ekonomis seperti film, radio, dan televisi, dan internet. Lahirnya media baru tersebut, untuk melengkapi bisnis media tersebut.

Ketiga, media berubah karena lahirnya kota-kota baru. Adanya kota-kota baru, pertama karena adanya kebijakan pemerintah untuk membuat kota

baru. Kedua, karena daerah tersebut memiliki sumber kekayaan alam yang besar, sehingga membuat arus urbanisasi masyarakat dari desa menuju kota tersebut cukup tinggi. Ketika kota-kota itu tumbuh yang ditandai dengan bertambahnya populasi dan meningkatnya sumber pendapatan masyarakat, maka jumlah penduduk yang meningkat tersebut merupakan pasar baru bagi media. Sehingga secara ekonomis, media dapat tumbuh di kota tersebut

Mengelola media massa memerlukan strategi khusus, karena manajemen media massa berbeda dengan manajemen bisnis nonmedia. Menurut David Croteau dan William Hoynes (2001:26-29), ada tiga hal yang membedakan bisnis media dengan nonmedia yaitu:

- a. Bisnis media massa beroperasi dalam pasar produk ganda yaitu menjual produk dan menawarkan iklan. Pada pasar pertama, media massa menjual produknya kepada masyarakat secara langsung. Untuk media cetak, manajemen media menjual surat kabar, majalah, dan tabloid. Untuk media elektronik menjual program acara hiburan yaitu film, talkshow, dan program berita yang dapat disaksikan langsung oleh masyarakat, Pada pasar kedua, media massa menyediakan ruangan (space) kepada produsen untuk memasang iklannya. Maka bagian pemasaran media massa akan mendatangi produsen untuk melakukan promosi dengan memasang iklan di media tersebut.
- b. media massa sebagai sumber-sumber kewargaan. Media massa tidak hanya memberikan informasi kepada warga, namun memberikan pendidikan informal kepada masyarakat.

c. keunikan status hukum media massa. Kebebasan berekspresi merupakan hak warga negara yang diidentikkan dengan media massa. Kebebasan menyatakan pendapat, yang menggunakan saluran media massa, sudah di atur dalam berbagai perangkat hukum.

Media massa mengandalkan pendapatannya pada pasar konsumen dan pasar iklan, menyebabkan media massa memiliki ketergantungan terhadap konsumen selaku pembeli produk dan produsen selalu pemasang iklan. Sehingga semakin tinggi ketergantungan terhadap iklan sebagai sumber pendapatan, semakin rendah pula kebebasan media massa dalam menulis konten berita dari kepentingan pengiklan dan bisnis secara umum. Dengan kata lain, setiap produsen yang telah memasang iklan pada media tersebut, konsekuensinya adalah media massa hanya memberitakan berita-berita yang bernada positif terhadap pemasang iklan. Media yang menggantungkan pendapatannya pada iklan, amat riskan terhadap perkembangan perekonomian suatu negara. Semakin tinggi perekonomian suatu negara, produsen semakin sering mengiklankan produknya di media massa. Namun begitu perekonomian negara jatuh, produsen pun mengurangi atau menghentikan belanja iklanya, yang berimplikasi surutnya para pemasang iklan di media massa. Persaingan dalam bisnis media, membuat kompetisi di bisnis media kian ketat. Maka, dalam menghadapi persaingan, media membuat berita yang memiliki nilai berita tinggi sehingga ingin diketahui semua orang.

Menurut David Croteau dan Wiliam Hoynes (2006:77) ada empat macam perkembangan yang terjadi dalam bisnis media, yaitu:

- a. growth (pertumbuhan) yang pesat, diwarnai dengan fenomena mergers antar perusahaan atau join, sehingga menjadi makin besar dan merambah ke manamana.
- b. integration (integrasi), raksasa media terintergrasi secara horisontal dengan bergerak ke berbagai bentuk media seperti film, penerbitan, radio dan sebagainya. Tapi juga terjadi integrasi secara vertikal, dengan pemilikan perusahaan di berbagai tahapan produksi dan distribusi, dari hulu sampai hilir. Misalnya memiliki perusahaan produksi film, sekaligus perusahaan bioskop, perusahaan DVD, dan jaringan stasiun televisi.
- c. globalization, konglomerat media telah menjadi entitas global, dengan jaringan pemasaran yang menembus yuridiksi negara.
- d. terkonsentrasinya kepemilikan media pada satu pemilik.

Ruang Publik VS Konglomerat Media Ada empat indikator yang dapat ditandai bila suatu media lebih mementingkan ekonomi dibanding menyediakan ruang publik (Crotau dan Hoynest, 2006:159-167) yaitu program acaranya homogen dan imitasi, menyiarkan informasi sensasional, hilangnya batas jurnalistik dan bisnis, serta menyensor diri sendiri.